

Pengaruh faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada DPRD terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

Lisa Marcelina, Azwar Ananda, Fatmariza, Cici Nur Azizah

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Azwar Ananda**

E-mail: Ananda.azwar4127@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan studi kasus di Kecamatan Lengayang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *ex post facto*. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 34.765 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan metode *multistage random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, dengan koefisien regresi sebesar 0,516 dan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Sebaliknya, kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap partisipasi politik, dengan koefisien regresi sebesar 0,066 dan nilai signifikansi 0,378 ($> 0,05$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik dengan nilai *F* sebesar 77,114 dan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran politik individu dibandingkan oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kepercayaan rendah, masyarakat tetap berpartisipasi karena dorongan tanggung jawab sosial, norma budaya, dan kesadaran politik yang tumbuh melalui interaksi sosial dan akses informasi.

Kata Kunci: kesadaran politik, partisipasi politik, Pemilu

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of political awareness and trust in the government on community political participation in the legislative election for DPRD (Regional House of Representatives) members in Pesisir Selatan Regency, with a case study in Lengayang District. This research employs a quantitative approach using the *ex post facto* method. The population in this study consists of 34,765 individuals registered in the Final Voter List. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected using

a multistage random sampling technique. The data analysis techniques used were descriptive statistics and multiple linear regression. The results show that political awareness has a significant influence on community political participation, with a regression coefficient of 0.516 and a significance value of 0.000 (< 0.05). Conversely, trust in the government does not have a statistically significant effect on political participation, with a regression coefficient of 0.066 and a significance value of 0.378 (> 0.05). Simultaneously, both variables significantly influence political participation, with an F-value of 77.114 and a significance level of 0.000. These findings indicate that political participation in Lengayang District is more strongly influenced by individual political awareness than by the level of trust in the government. This suggests that despite low levels of trust, people still participate due to social responsibility, cultural norms, and political awareness fostered through social interaction and access to information.

Keywords: *political awareness, political participation, general election.*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang akan mengelola kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, Pemilu menjadi instrumen utama dalam proses sirkulasi kekuasaan yang berlangsung secara damai, teratur, dan beradab. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pemerintahan, salah satunya melalui partisipasi dalam pemilu. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, bergabung dalam gerakan sosial, hingga menghadiri rapat umum. Negara juga menjamin hak partisipasi ini melalui peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Jaminan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara.

Pemilu legislatif sendiri merupakan momentum penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih wakilnya secara langsung di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan data

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota DPRD mencapai 75,92%. Di Kecamatan Lengayang, partisipasi pemilih mencapai 72% dari total 47.514 Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 34.765 orang.

Meski angka partisipasi di Kecamatan Lengayang tergolong cukup tinggi, dinamika partisipasi politik di daerah ini tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor. Surbakti (2010) menyebutkan bahwa kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan dua faktor penting yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik mencerminkan sejauh mana individu memahami, tertarik, dan merasa terlibat dalam isu-isu politik. Tingkat kesadaran ini dapat terlihat dari bagaimana masyarakat menentukan pilihan politik mereka, termasuk ketertarikan pada figur calon, program kerja, afiliasi partai, serta penilaian terhadap kinerja calon tersebut.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat di Kecamatan Lengayang masih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional seperti hubungan kekerabatan, kesamaan organisasi, dan asal daerah calon, bukan berdasarkan pertimbangan rasional atau ideologis. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik, termasuk DPRD, juga menjadi variabel penting yang memengaruhi partisipasi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji politik dan perilaku elit yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan publik menjadi alasan sebagian masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Sadeli et al. (2022) dan Burhanudin (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran politik berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik. Demikian pula, Merry et al. (2018) dan Layungsari (2023) menegaskan hubungan positif antara kepercayaan dan kesadaran politik dengan intensi partisipasi politik pada konteks yang berbeda.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Lengayang. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus memfokuskan pada partisipasi politik dalam pemilihan calon anggota DPRD di tingkat kabupaten, dengan wilayah kajian Kecamatan Lengayang sebagai studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *ex-post facto*, yaitu meneliti hubungan kausal antar variabel setelah peristiwa terjadi tanpa manipulasi variabel independen. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan lengayang, kabupaten pesisir Selatan. Penelitian menggunakan kuesioner tertutup berskala Likert sebagai instrumen utama. Populasi penelitian ini yaitu seluruh Masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 34.765 orang. Untuk pengambilan sampel menggunakan Teknik *multistage random sampling*, Dimana ini dilakukan dengan beberapa tingkat dengan rancangan proses pemilihan secara random. Maka terpilih 4 TPS dengan jumlah 885 orang, dan jumlah minimum sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* 10% sebanyak 100 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sementara analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan bantuan software IBM SPSS. Analisis mencakup statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data dan karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Metode ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan dapat digeneralisasi kepada populasi yang lebih luas, sekaligus sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua faktor utama terhadap partisipasi politik masyarakat. Ada tiga variabel dan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel dan indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel dan indikator

Variabel	Indikator
Kesadaran Politik	Pengetahuan
	Pemahaman
	Sikap
	Pola Perilaku
Kepercayaan Terhadap Pemerintah	Konsistensi
	Kejujuran
	Kepuasan Publik
Partisipasi politik	Keterlibatan dalam pemilu
	Keterlibatan dalam kampanye

Uji Normalitas. Uji t, Uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dicantumkanlah hasil dari penelitian ini. Untuk itu dapat dilihat hasil analisis data oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	100
	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.11887637
	Absolute	.095
	Most Extreme Positive	.095
	Negative	-.089
	Kolmogorov-Smirnov Z	.954
Asymp. Sig. (2-tailed)		.322

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 20

Dari hasil uji normalitas yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,32 > 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.231	2.877		.775	.440
Kesadaran Politik	.516	.062	.727	8.259	.000
Kepercayaan Terhadap Pemerintah	.066	.074	.078	.886	.378

a. Dependent Variable: Partisipasi politik

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 20

Diperoleh nilai konstanta sebesar 2,231 yang menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Politik dan Kepercayaan terhadap Pemerintah bernilai nol, maka nilai partisipasi politik diprediksi sebesar 2,231. Namun demikian, karena nilai signifikansinya sebesar 0,440 ($p > 0,05$), maka konstanta ini tidak signifikan secara statistik dan tidak memiliki makna interpretatif yang kuat. Kesadaran Politik ($B = 0.516$, $p = 0.000$) Artinya Koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Politik (X_1) adalah sebesar 0,516 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan Kesadaran Politik akan meningkatkan partisipasi politik sebesar 0,516 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Karena nilai $p = 0.000 < 0.05$, maka pengaruh ini signifikan secara statistik. Nilai Beta = 0.727. Hasil ini didukung oleh uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik adalah signifikan

Sementara itu, kepercayaan terhadap pemerintah ($B = 0.066$, $p = 0.378$). Artinya koefisien regresi variabel Kepercayaan terhadap Pemerintah (X_2) memiliki nilai sebesar 0,066, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkatkan partisipasi politik sebesar 0,066 satuan, $Beta = 0.078$ artinya pengaruhnya lemah dan tidak berarti secara statistik. Hasil ini di dukung oleh uji T yang menunjukkan nilai signifikansi variabel ini adalah 0,378 ($> 0,05$), sehingga pengaruhnya tidak signifikan secara statistik terhadap partisipasi politik. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dilakukan pembahasan mengenai temuan penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi, karena menggambarkan sejauh mana masyarakat yakin terhadap integritas, akuntabilitas, dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas publik. Dalam konteks pemilu, kepercayaan terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan wakil-wakil mereka. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap DPRD dengan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang. Meskipun angka partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang mencapai 72% (kategori baik), fenomena ini tidak serta-merta mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap lembaga perwakilan atau calon legislatif yang dipilih. Temuan ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi teoritis dan realitas empiris. Masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya, bahkan ketika mereka memiliki pandangan skeptis terhadap janji-janji politik atau efektivitas kinerja anggota DPRD.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori Milbrath (dalam Chotimah, 2015) yang menyatakan bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif atau rasional, tetapi juga oleh latar belakang sosial, tekanan budaya, serta keterikatan emosional. Di Kecamatan Lengayang, masyarakat cenderung memilih calon berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan organisasi, asal daerah, dan pertimbangan sosial-budaya lainnya. Pilihan politik mereka lebih bersifat afektif dan simbolik daripada ideologis atau berbasis program. Teori partisipasi dari Sundariningrum (2001) juga mendukung temuan ini dengan menyebutkan bahwa partisipasi politik dapat terjadi dalam bentuk simbolik atau delegatif, tanpa harus didahului oleh kepercayaan penuh terhadap institusi politik. Partisipasi semacam ini sering kali dilandasi oleh tanggung jawab sosial, tekanan lingkungan, atau sekadar mengikuti norma masyarakat, bukan karena keyakinan terhadap efektivitas pemerintahan atau representasi politik.

Lebih jauh, Huntington (1991) menjelaskan bahwa dalam masyarakat tertentu, partisipasi politik tidak selalu merupakan hasil dari kesadaran politik yang mendalam atau kepercayaan terhadap sistem, melainkan bisa menjadi respons spontan terhadap lingkungan sosial. Dalam hal ini, partisipasi politik di Kecamatan Lengayang dapat dilihat sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun, solidaritas kelompok, atau harapan pragmatis terhadap perubahan kondisi ekonomi, bukan semata-mata hasil penilaian terhadap kinerja atau janji politik DPRD. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, khususnya terhadap partai politik dan calon legislatif yang sering gagal memenuhi janji kampanye, memang berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik. Surbakti (1992) menyebutkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat memicu apatisme atau partisipasi yang bersifat pasif. Namun, dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa kepercayaan rendah tersebut tidak secara signifikan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat tetap terjadi meskipun tidak didasarkan pada keyakinan terhadap institusi politik, melainkan karena dorongan eksternal seperti norma sosial, budaya lokal, atau kewajiban sebagai warga negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesadaran politik dan persepsi pribadi terhadap lembaga negara berinteraksi dengan faktor eksternal seperti struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tekanan komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanit (2001) dan Weimar (dalam Sholihin, 2014), partisipasi politik adalah produk dari berbagai determinan sosial-politik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan sosiologis dalam memahami

partisipasi politik masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan karakter budaya yang kuat seperti Kecamatan Lengayang. Artinya, kepercayaan terhadap pemerintah memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu partisipasi politik. Pola-pola partisipasi yang terbentuk lebih kompleks dan dipengaruhi oleh nilai, norma, dan jaringan sosial yang berkembang di masyarakat.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap Partisipasi Politik

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi, karena menggambarkan sejauh mana masyarakat yakin terhadap integritas, akuntabilitas, dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas publik. Dalam konteks pemilu, kepercayaan terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan wakil-wakil mereka. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap DPRD dengan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang. Meskipun angka partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang mencapai 72% (kategori baik), fenomena ini tidak serta-merta mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap lembaga perwakilan atau calon legislatif yang dipilih. Temuan ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi teoritis dan realitas empiris. Masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya, bahkan ketika mereka memiliki pandangan skeptis terhadap janji-janji politik atau efektivitas kinerja anggota DPRD.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori Milbrath (dalam Chotimah, 2015) yang menyatakan bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif atau rasional, tetapi juga oleh latar belakang sosial, tekanan budaya, serta keterikatan emosional. Di Kecamatan Lengayang, masyarakat cenderung memilih calon berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan organisasi, asal daerah, dan pertimbangan sosial-budaya lainnya. Pilihan politik mereka lebih bersifat afektif dan simbolik daripada ideologis atau berbasis program. Teori partisipasi dari Sundariningrum (2001) juga mendukung temuan ini dengan menyebutkan bahwa partisipasi politik dapat terjadi dalam bentuk simbolik atau delegatif, tanpa harus didahului oleh kepercayaan penuh terhadap institusi politik. Partisipasi semacam ini sering kali dilandasi oleh tanggung jawab sosial, tekanan lingkungan, atau sekadar mengikuti norma masyarakat, bukan karena keyakinan terhadap efektivitas pemerintahan atau representasi politik.

Lebih jauh, Huntington (1991) menjelaskan bahwa dalam masyarakat tertentu, partisipasi politik tidak selalu merupakan hasil

dari kesadaran politik yang mendalam atau kepercayaan terhadap sistem, melainkan bisa menjadi respons spontan terhadap lingkungan sosial. Dalam hal ini, partisipasi politik di Kecamatan Lengayang dapat dilihat sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun, solidaritas kelompok, atau harapan pragmatis terhadap perubahan kondisi ekonomi, bukan semata-mata hasil penilaian terhadap kinerja atau janji politik DPRD. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, khususnya terhadap partai politik dan calon legislatif yang sering gagal memenuhi janji kampanye, memang berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik. Surbakti (1992) menyebutkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat memicu apatisme atau partisipasi yang bersifat pasif. Namun, dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa kepercayaan rendah tersebut tidak secara signifikan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat tetap terjadi meskipun tidak didasarkan pada keyakinan terhadap institusi politik, melainkan karena dorongan eksternal seperti norma sosial, budaya lokal, atau kewajiban sebagai warga negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Lengayang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesadaran politik dan persepsi pribadi terhadap lembaga negara berinteraksi dengan faktor eksternal seperti struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tekanan komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanit (2001) dan Weimar (dalam Sholihin, 2014), partisipasi politik adalah produk dari berbagai determinan sosial-politik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan sosiologis dalam memahami partisipasi politik masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan karakter budaya yang kuat seperti Kecamatan Lengayang. Artinya, kepercayaan terhadap pemerintah memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu partisipasi politik. Pola-pola partisipasi yang terbentuk lebih kompleks dan dipengaruhi oleh nilai, norma, dan jaringan sosial yang berkembang di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik Masyarakat. Sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan. Masyarakat di Kecamatan Lengayang yang memiliki tingkat kesadaran politik yang baik cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya, karena mereka memahami pentingnya pemilu dalam menentukan arah kebijakan dan perwakilan rakyat. Sebaliknya, meskipun tingkat kepercayaan terhadap DPRD relatif rendah akibat kekecewaan terhadap janji politik yang tidak terealisasi, hal ini tidak sepenuhnya

menghambat partisipasi politik. Masyarakat tetap memilih karena dorongan norma sosial, ikatan budaya, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, partisipasi politik di Kecamatan Lengayang lebih dipengaruhi oleh kesadaran politik dan faktor sosial-budaya daripada oleh tingkat kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Layungsari, S. (2023). *Pengaruh Kepercayaan Politik Dan Kesadaran Politik Terhadap Intensi Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Merry, A., Asrinaldi, A., & Zetra, A. Z. (2018). Pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Dharmastraya pada pilkada 2015. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), 109–132
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). Political participation: How and why do people get involved in politics?. (No Title).
- Miriam, B. (1982). Masalah Kenegaraan. Jakarta: PT Gramedia.
- Ruslan, U. A. M. (2000). Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, terj. Salafuddin Abu Sayyid, Hawin Murtadho, Dan Jasiman. Solo: Era Intermedia.
- Sadeli, E. H., Sukma, R. A., Fajar, W. N., & Faridli, E. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 3(2), 117-126.
- Sholihin, R., & Fitriyah, N. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 495-505.
- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta.
- Thaha, I. *Kesadaran Politik DAN Partisipasi Politik: (Studi Atas Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Gantungan, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah)* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277